



**Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2015**

**Delapan Pemerintah Daerah Di Jawa Barat Menyusul Raih Opini WTP**

***Bandung – Hukum dan TU Perwakilan***

Di hari kedua Ramadhan, BPK Perwakilan Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2015 pada 12 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Keduabelas Pemda yang dijadwalkan menerima LHP atas LKPD TA 2015 pada Selasa (7/6) adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Depok dan Kota Bekasi.

Prestasi membanggakan diraih oleh lima Pemda yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kelima Pemda tersebut adalah Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bekasi. Sedangkan Pemda yang baru kali pertama menerima opini WTP adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Bekasi. Dengan demikian, terdapat 8 pemda dari 12 pemda yang dijadwalkan menerima LHP hari ini berhasil meraih opini WTP. Sedangkan Pemda lainnya yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, dan Kota Bandung, masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Keseluruhan opini tersebut disampaikan Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa SST, M.Acc., Ak. kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jabar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tahun 2015 ini merupakan tahun pertama bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik pada penerapan sistem akuntansinya maupun pada penyajian laporan keuangannya. Manfaat akuntansi berbasis akrual adalah dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Dalam pidato sambutan Kalan, diungkapkan bahwa opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di kemudian hari. Hal ini penting disampaikan mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK.

Beberapa permasalahan terkait dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang masih dihadapi oleh Pemda diantaranya adalah masalah penyusutan (termasuk beban penyusutan yang tersaji di LO dan akumulasi penyusutan di Neraca, masalah penyajian Dana BOS dan dana lainnya di luar APBD. Adapun temuan yang perlu mendapat perhatian pada beberapa Pemda diantaranya adalah, pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan/atau BUD, aset tetap tanah yang dimiliki Pemda yang masih belum bersertifikat, tanah fasos fasum yang belum diserahkan kepada Pemda setempat, kesalahan alokasi penganggaran, dan pengelolaan PBB P2 setelah pelimpahan dari Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima melalui rencana aksi (*action plan*). BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi dan pelaksanaan *action plan* melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

Sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan LHP atas LKPD TA 2015 kepada Pemprov Jawa Barat pada Kamis (2/6) dengan opini WTP untuk kelima kalinya dan 11 Pemda pada Senin (6/6) dengan opini WTP. Penyerahan hari ini melengkapi agenda penyerahan LHP atas LKPD TA 2015 yang pemeriksaannya telah dilakukan beberapa waktu lalu. (\*\*/humas bpk)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Contact Person :**

Dwi Hendianto

Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Jln. Moch. Toha No.164 Bandung, Jawa Barat

Telp. (022) 5207294, Fax. (022) 5207898; e-mail : [humasbpb\\_bdg@yahoo.co.id](mailto:humasbpb_bdg@yahoo.co.id)